



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JOHN ROBERTHO
2. Jabatan : DIREKTUR KESELAMATAN DAN KEAMANAN
3. NHK : 98114

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.670.000.000

1. Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI  
Rp. 20.000.000
2. Tanah Seluas 384 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL  
SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/67 m2 di KAB / KOTA KOTA  
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/116 m2 di KAB / KOTA  
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/158 m2 di KAB / KOTA KOTA  
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 572.400.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI  
Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI  
Rp. 5.500.000
3. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
250.000.000
4. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5 E Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.  
310.400.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 128.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.027.501.831



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.397.901.831
III. HUTANG	Rp.	36.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.361.901.831

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.